



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Dibuat oleh:

Anggy Vanesya Putri Syahdika

022117167

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2021



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada

Anggy Vanesya Putri Syahdika

022117167

Disetujui

Ketua Penguji Sidang

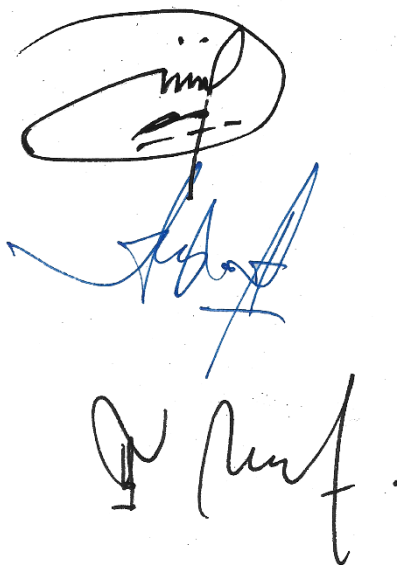
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)

Ketua Komisi Pembimbing

(Ahmad Burhanudin Taufik, Ak, ME, CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Ellyn Octavianty, SE, M.M)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggy Vanesya Putri Syahdika

NPM : 022117167

Judul Skripsi : Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD
Kabupaten Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produksi skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 14 Mei 2021



Anggy Vanesya Putri Syahdika
022117167

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Masalah perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sepanjang Tahun 2019 pengelolaan keuangan dan barang di seluruh Perangkat Daerah menjadi akuntabel sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap dan transparansi dengan pengawasan yang baik dan konsisten sehingga menyandang predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” serta mampu memberikan kontribusi untuk “Mewujudkan Kota Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di BPKAD kota Bogor. Sampel penelitian ini diambil menggunakan stratified random sampling. Metode pengambilan data dilakukan dengan data sekunder dan data primer untuk melakukan pengolahan atau analisis data menggunakan pengujian kualitas dilakukan dengan Uji Validitas, Uji Realibilitas, sedangkan uji asumsi klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedasitas, dan Uji Hipotesis menggunakan Uji t tabel dan Uji f tabel.

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Bogor dapat diambil yaitu terdapat pengaruh positif pada Pengendalian Internal dengan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, tidak terdapat pengaruh positif pada Akuntabilitas dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, tidak terdapat pengaruh positif pada Transparansi dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan terdapat pengaruh positif pada Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi dengan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan jika pemerintah daerah melakukan hal tersebut secara bersama-sama maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah tersebut.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topic dalam penulisan ini adalah **“Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor.”**

Begitu banyak pihak yang telah bersedia terlibat dan membantu serta mendorong penulis dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Syafrizal Chaniago (alm) dan Ibunda Ikawati, kakak terkasih yaitu Devy Ananda Syahdika yang selalu setia menemani saya di setiap titik saya hingga mengantarkan saya sampai sarjana dengan penuh kasih sayang yang tidak akan tergantikan oleh apapun, serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat, dukungan dalam bentuk apapun dan juga doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Chaidir, S.E., M.M. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Burhanudin Taufik, Ak., M.E, CA. selaku Ketua Komisi pembimbing dan Ibu Ellyn Octavianty, S.E., M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu membimbing dan memberi dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pakuan yang telah membantu dan terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Saudara saya Daffa Haykal Rizky Fadillah yang selalu membagikan pengalaman sehingga saya lebih termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Soulmate sedari dulu Dinda Ayesha Fatia yang selalu mendengarkan keluhan dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Sahabat saya Shintya Desi Fitriani dan Betharina Muna Salsabila yang selalu ada untuk saya saat saya sedang mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan support yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Partner saya Melki Juwanto yang selalu memberikan dukungan penuh agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan baik.
13. Teman-teman dekat saya Dinna, Uyung, Inun, Alda, Haikal, dan Kimul yang menjadi tempat saya untuk menuangkan rasa jenuh dan lelah dan selalu memberikan semangat dan kritikan yang patut saya jadikan motivasi.
14. Partner semasa kuliah Yusnasari Simanjuntak dan Astrie Khaerannisa yang selalu menemani perjalanan saya semasa kuliah dan menjadi tempat saya untuk bercerita dan memberikan dukungan yang cukup berpengaruh untuk saya serta teman-teman kelas D dan satu angkatan yang menjadi tempat bertukar cerita dan wawasan.
15. Teman pertama kuliah saya yang sudah pasti menjadi bagian *support system* saya yaitu Annis Cempaka, Alda Amelinda, dan Namira.
16. Kucing kesayangan saya Oyip yang sudah menjadi teman hiburan saat saya sedang tidak bersemangat.
17. Terima kasih untuk diri sendiri karena sudah mampu bertahan dan melewati setiap keadaan sehingga dapat mewujudkan mimpi saya, ibu saya, dan almarhum ayah saya untuk menjadi seorang sarjana dan segala usaha kedepannya menjadi wanita yang sukses baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR ISI

Judul	
Lembaran Pengesahan Skripsi.....	ii
Lembaran Pengesahan dan Pernyataan Telah Disidangkan.....	iii
Lembaran pernyataan perlimpahan hak cipta.....	iv
Lembaran Hak Cipta.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud Penelitian dan Tujuan penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	6
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	6
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal.....	6
2.1.2 Manfaat Pengendalian Internal.....	7
2.1.3 Komponen Pengendalian Internal.....	7
2.2.1 Akuntabilitas.....	8
2.2.3 Transparansi.....	12

2.2.4 Kinerja Pemerintah Daerah.....	15
2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	18
2.3.1 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3.2 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis Penelitian	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	31
3.2.1 Objek Penelitian.....	31
3.2.2 Unit Analisis	31
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.4 Operasionalisasi Variabel	32
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	37
3.6 Metode Pengumpulan Data	37
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	37
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Pengumpulan Data	40
4.2 Analisis Data	43
4.2.1 Uji Validitas.....	43
4.2.2 Uji Realibilitas	46
4.2.3 Uji Normalitas.....	48
4.2.4 Uji Multikolinearitas.....	49
4.2.5 Uji Heteroskedastisitas	50
4.2.6 Uji Hipotesis	50
4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	53
4.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	53
4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	53
4.3.3 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	54

4.3.4 Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	54
BAB V.....	56
SIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Simpulan.....	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
Lampiran	61
SURAT PENYATAAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Bogor	31
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	41
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.3 Uji Validitas variabel Pengendalian Internal	43
Tabel 4.4 Uji Validitas variabel Akuntabilitas	45
Tabel 4.5 Uji Validitas variabel Transparansi	45
Tabel 4.6 Uji Validitas variabel Kinerja	46
Tabel 4.7 Uji Realibilitas variabel Pengendalian Internal	46
Tabel 4.8 Uji Realibilitas variabel Akuntabilitas	47
Tabel 4.9 Uji Realibilitas variabel Transparansi	47
Tabel 4.10 Uji Realibilitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah	48
Tabel 4.11 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	49
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.14 Uji t tabel	51
Tabel 4.15 Uji F tabel	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 urut permohonan pengisian kuesioner.....	60
Lampiran 2 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bogor.....	66
Lampiran 3 Tabulasi Kuesioner.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mohamad, 2016). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur.

Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengendalian, akuntabilitas, transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Terkait dengan akuntabilitas, Baldrick (2017) mengatakan bahwa penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengendalian internal menurut Tuanakotta (2014) ialah proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal membahas hal – hal antara lain perilaku manajemen terhadap pengendalian, kompetensi karyawan inti, penilaian risiko, akuntansi, sistem informasi keuangan lain-lain yang dipergunakan, dan kegiatan pengendalian tradisional. Pengendalian internal memiliki tujuan mempersempit laporan keuangan bebas

dari salah saji material, yang penyebabnya ialah kesalahan (error) ataupun kecurangan (fraud). Semakin lancar kerja dan disertai pengendalian yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengendalian yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik (Abdul, 2016: 56). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2015:14).

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja pemerintah. Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Menurut Abdul (2016: 56) Transparansi dapat diartikan memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai dan jujur kepada publik sesuai dengan perundang-undangan. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah. Pemerintah selalu memberikan penjelasan pada masyarakat yang tidak masuk akal atau sulit dicerna oleh masyarakat. Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan oleh pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas atas pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya.

Pengendalian internal keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi BPKAD sesuai tugas dan fungsinya berupaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif dengan dengan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu saja, target yang harus dicapai oleh BPKAD bukanlah hal yang mudah, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder sehingga raihan opini WTP selama empat kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2015-2018 dapat dipertahankan untuk 5 tahun kedepan.

Demi kesinambungan pencapaian WTP maka BPKAD telah merancang tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor : 050/382/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Dimana tujuan yang akan dicapai BPKAD Tahun 2013-2018 adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel di Perangkat Daerah dengan indikator tujuan yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan target "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Tujuan yang akan dicapai, dijabarkan melalui tiga sasaran yaitu sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah diupayakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang daerah, sasaran

ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BPKAD akan dicapai melalui program penunjang.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			SISA ANGGARAN
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4
6	PEMBIAYAAN DAERAH	602.780.607.000,00	585.887.130.027,71	97,20	16.893.476.972,29
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	713.480.607.000,00	696.587.130.027,71	97,63	16.893.476.972,29
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	692.815.793.000,00	692.814.027.451,33	100,00	1.765.548,67
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	20.664.814.000,00	-	-	20.664.814.000,00
6 1 7	Penerimaan Hasil Investasi Daerah-Pengembalian Dana Bergulir GMM	-	3.773.102.576,38	-	(3.773.102.576,38)
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	110.700.000.000,00	110.700.000.000,00	100,00	-
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	100,00	-
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67.700.000.000,00	67.700.000.000,00	100,00	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	685.197.888.082,06		(685.197.888.082,06)

Untuk itu BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, berupaya untuk mempertahankan opini WTP yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan opini WTP di tahun-tahun yang akan datang. BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan terkait pengelola keuangan dan barang daerah, tidak hanya menitik beratkan sosialisasi dalam aspek perencanaan anggaran saja namun juga melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMRAL serta Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah SIMRAL yang dilaksanakan 2 (dua) gelombang yaitu Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 16-24 Oktober 2019 dan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 20-28 Nopember 2019 dengan tujuan yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para Bendahara BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Petugas Akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor agar terlatih dalam menggunakan aplikasi simral dengan menitik beratkan pada modul penatausahaan dan modul akuntansi. Sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu mengembangkan kapasitas sumber daya pengguna (user) SIMRAL sebanyak 287 peserta bimtek. Pemberian materi penatausahaan dan akuntansi untuk mengantisipasi lebih awal kesulitan dan hambatan yang kemungkinan terjadi dalam penatausahaan keuangan dan pencatatan akuntansi dengan menggunakan aplikasi SIMRAL. Selain itu terdapat kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diharapkan pengurus barang seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor mengetahui dan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (artikel : <http://targetbuser.co.id/mewujudkan-pengelolaan-keuangan-dan-barang-daerah-yang-akuntabel-di-pemerintah-kabupaten-bogor/>) (BMD) serta mampu mengaplikasikan Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) untuk modul mapping atas penggolongan dan kodefikasi BMD. Kegiatan ini dilaksanakan

pada tanggal 4-6 Nopember 2019 dengan peserta sebanyak 76 orang yang berasal dari Pengurus Barang Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sepanjang Tahun 2019 pengelolaan keuangan dan barang di seluruh Perangkat Daerah menjadi akuntabel sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap dan transparansi dengan pengawasan yang baik dan konsisten sehingga menyandang predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” serta mampu memberikan kontribusi untuk “Mewujudkan Kota Bogor Ter maju, Nyaman, dan Berkeadaban”

1.2 Identifikasi dan Perumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pengawasan keuangan daerah perlu untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis atau belum. Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Siregar (2011) dan Magdalena (2014) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan good government.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh Pengendalian Internal terhadap kinerja pada BPKAD kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pada BPKAD kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap kinerja pada BPKAD kabupaten Bogor?
4. Bagaimana pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pada BPKAD kabupaten Bogor?

1.3 Maksud Penelitian dan Tujuan penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pengendalian keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pada pemerintah daerah yang berdampak terhadap kinerja BPKAD kabupaten Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini untuk menguji :

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap kinerja pada BPKAD Kabupaten Bogor
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pada BPKAD Kabupaten Bogor
3. Pengaruh Transparansi terhadap kinerja pada BPKAD Kabupaten Bogor
4. Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja pada BPKAD Kabupaten Bogor

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Manfaat bagi kantor BPKAD Kabupaten Bogor diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola *good government*. Manfaat bagi almamater dimana hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengendalian intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengendalian lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.1.2 Manfaat Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2001:163) menyatakan bahwa “Adanya tujuan Sistem Pengendalian Internal menurut defenisi tersebut adalah Menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efisiensi dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Pengawasan internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja Itjen Depdagri. Seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko. Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengawasan intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

2.1.3 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki unsur-unsur yang mewakili apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memiliki suatu hubungan langsung antar tujuan-tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. COSO (2013:4) dalam Internal Control-Intergrated Framework (ICIF) terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

1. *Control Environment*
2. *Risk Assessment*
3. *Control Activities*
4. *Information And Communication*
5. *Monitoring*

Indikator Pengendalian Internal di ambil dari teori komponen pengendalian internal menurut Communittee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission (COSO) yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian yaitu meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait. (2) Penilaian Risiko yaitu meliputi berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah, saling melengkapi, menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama

instansi pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran, dan didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup,serta melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya (3) Aktivitas Pengendalian meliputi Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, Pembinaan SDM, Pengendalian atas pengelolaan system informasi, Pengendalian fisik atas asset, Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja, Pemisahan fungsi, Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, Pencatatan yang akurat dan tepat waktu, Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. (4) Informasi dan Komunikasi yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus. (5) Pemantauan yaitu pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian intern yaitu melai pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.2.1 Akuntabilitas

2.2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Menurut Indra Bastian (2010:385) mengatakan bahwa “Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2013:18) adalah sebagai “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) *right to know*
- 2) *right to be informed*
- 3) *right to be heard and to be listened to*

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal, yaitu pelaporan kepada atasan akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal, yaitu pelaporan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (principal) (Mahmudi, 2016:19). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas publik yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju clean governance atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

2.2.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Budiardjo (2007:81) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber- sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen

Menurut Saleh dan Iqbal (2008:45), akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

1. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lainlain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya, dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.
2. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpanan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Polidano (2008:48) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

2.2.2.3 Elemen Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban *horizontal accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban *vertical accountability* yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21). Menurut Polidano (2008:48) mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu: (1) Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka

di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing), (2) Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru, (3) Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media masa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

2.2.2.4 Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Menurut (Waluyo, 2007:182) menyatakan bahwa manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk (1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, (2) Mendorong terciptanya transparansi dan responsivitas organisasi, (3) Mendorong partisipasi masyarakat, (4) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, (5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja, (6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin, (7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2.5 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas di ambil dari dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Hopwood dan Tomkins adalah sebagai berikut : (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. (2) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. (3) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. (4) Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. (5) Akuntabilitas Finansial yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.2.3 Transparansi

2.2.3.1 Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.” (Mardiasmo, 2009:30)

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.” (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009:104)

Standar Akuntansi Pemerintah (2010:22) menyatakan bahwa “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Transparansi keuangan adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan di dalam sebuah institusi atau lembaga publik karena keuangan merupakan sektor paling riskan yang mungkin akan diselewengkan. Transparansi keuangan

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi menurut Marisi Purba (2012:24) adalah “Keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan”.

“Transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Sehingga masyarakat secara mudah bertanya mengenai hasil kegiatan ataupun pengelolaan keuangan.” (Ratminto, 2006 dalam Anggraini, 2013)

Definisi Transparansi menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) yaitu “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada-nya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Kemudian transparansi menurut Mursyidi (2015:44) yaitu “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan”.

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua informasi dan tidak boleh ada hal yang dirahasiakan atau disembunyikan. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

2.2.3.2 Manfaat Transparansi

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Manfaat transparansi menurut Nico Andrianto (2007:21), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu: (1) Mencegah korupsi, (2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, (3) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga, (4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu, (5) Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, (6) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

2.2.3.3 Prinsip Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Krina (2003:17) menyatakan bahwa prinsip ini menekankan kepada 2 aspek yaitu (1) Komunikasi publik oleh pemerintah, (2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Krina (2003:17) indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, (2) Kemudahan akses informasi, (3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2.2.3.4 Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

Invormativeness yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat :

“indikator dari informatif (1) tepat waktu laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. (2) memadai penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. (3) jelas informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. (4) akurat informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. (5) dapat diperbandingkan laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. (6) mudah diakses informasi harus mudah diakses oleh semua pihak. (7) *openness* yaitu keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. (8) *disclosure* yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. Indikator dari *disclosure* (1) kondisi keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu. (2) susunan pengurus komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). (3) bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” (Mardiasmo, 2009:19)

2.2.4 Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.4.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para pegawai negeri sipil sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering para pegawai tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi dalam suatu instansi pemerintahan menghadapi krisis yang serius.

2.2.4.2 Indikator Kinerja

Teori kinerja dari **Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia** terdapat indikator kinerja, yaitu:

“(1) produktivitas karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. (2) kualitas layanan Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. (3) responsivitas kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya. (4) tanggungjawab menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit. (5) akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.” (Dwiyanto, 2008:50-51).

Berdasarkan pengertian kinerja pemerintahan di atas, maka kinerja pemerintahan berarti sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda -tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Sementara itu Prawirosentono mengartikan kinerja (performance) adalah sebagai berikut: “Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”. (Prawirosentono, 1999:2).

Kinerja merupakan hasil kerja oleh pegawai atau aparatur disdukcapil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang masing-masing yang bisa dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai suatu organisasi. Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. (Hasibuan, 2001:34) Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk mencapai sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan

waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan di dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja para pegawai.

Menurut Rivai & Basri dalam Masram (2017:138) menyatakan bahwa “Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama”. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson dalam Masram (2017:138) juga menyebutkan bahwa “Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan pada periode tertentu.

Manajemen kinerja merupakan sebuah proses penataan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dengan penataan tersebut diharapkan kinerja karyawan meningkat sehingga produk yang dihasilkan sebuah perusahaan memiliki mutu yang tinggi, sesuai harapan konsumen. Untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan ada beberapa variable yang menjadi tolok ukur yaitu :

1. Input

Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan.

2. Proses

Kinerja proses sangat menentukan mutu produk dan tentunya juga menentukan kelangsungan hidup perusahaan atau sebuah institusi. Pada sebuah perusahaan kinerja proses dapat dilihat dari metode pemeriksaan bahan, metode pengolahan bahan, pengendalian mutu, proses manajemen perusahaan, pengembangan SDM, penggalangan Kerjasama dengan mitra kerja.

3. Output

Dengan mengukur output atau keluaran maka dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator output atau keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Contoh output pada perusahaan yaitu jumlah produk yang dihasilkan, mutu produk yang dihasilkan, jumlah pelatihan, dan jumlah mitra kerja.

4. Outcome

Indikator outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indicator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Contoh indikator kinerja outcome pada perusahaan yaitu jumlah produk yang terjual dan jumlah karyawan yang lebih kompeten dalam mengerjakan tugas.

5. Benefit

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari produk yang dihasilkan dan menajajemen perusahaan. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan Panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai apabila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana, dll)

6. Impact

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari output, outcome, maupun benefit yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indicator benefit atau manfaat, indicator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan Panjang. Indikator impact atau dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sectoral, regional dan nasional.

Selanjutnya menurut Robbins dalam Rozarie (2017:65) penilaian kinerja terdiri dari pendekatan sikap, pendekatan perilaku, pendekatan hasil, pendekatan kontingensi. Adapun penjelasan mengenai jenis penilaian tersebut adalah:

1. Pendekatan sikap, pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu.
2. Pendekatan perilaku, melihat bagaimana orang berperilaku. Kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kerja.
3. Pendekatan hasil, perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang atau yang diselesaikan individu.
4. Pendekatan kontingensi, pendekatan ini selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Pendekatan sikap cocok ketika harus membuat keputusan promosi untuk calon yang mempunyai pekerjaan tidak sama.

2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, 2019 & Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah	Komunikasi publik oleh pemerintah yaitu meliputi :penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Hak masyarakat terhadap akses informasi 55 Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis - Vol 10 No 1 Maret 2019 yaitu meliputi : Kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.	Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji F.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.

2.	Budi Purnomo, Cahaya Putri, 2018 & Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	Akuntabilitas, pengawasan, transparansi, <i>value for money</i>	Indikator dari masing-masing variabel tersebut yang perlu ditingkatkan, yaitu: (1) Keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam tahapan pengelolaan anggaran sebagai salah satu indikator Akuntabilitas belum dilakukan secara optimal, oleh karenanya perlu ditingkatkan agar apa yang menjadi program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. (2) Penyampaian informasi terkait anggaran sebagai salah satu indikator dari transparansi belum optimal dilakukan.	Metode analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software Smart PLS. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-statistic.	Hasil penelitian dengan evaluasi inner model menunjukkan secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.
3.	Endang Sri Wahyuni, Rosmida, 2016 & Analisis Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah	<i>Performance, Organizational, culture, Locus Of Control (LOC), district,</i>	Terdapat 9 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja aparat pemerintah daerah, diantaranya: planning	Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kuesioner.	Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh

	Kabupaten Bengkalis	<i>government</i> s.	(perencanaan), investigating (investigasi/pe meriksaan), coordinating (koordinasi), evaluating (evaluasi), supervising (pengawasan), staffing (pemilihan staf), negotiating (negosiasi), representing (perwakilan), rate your overall performance (tingkat kinerja secara keseluruhan)		terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan variabel locus of control juga berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh budaya yang terbentuk didalam sebuah organisasi, selain itu juga dipengaruhi oleh tipe personalitas individu, yaitu individu dengan internal control lebih banyak berorientasi pada tugas yang dihadapinya, sehingga akan meningkatkan kinerjanya.
4.	Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey, 2018 & Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja	Akuntabilit as, Transparan si, Fungsi Pemeriksaa n Intern Dan Kinerja Pemerintah Daerah	Transparansi penyelenggaraa n pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah	Metode analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software Smart PLS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

	Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)		diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.	Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-statistic	daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
5.	Guasmin Guasmin, Dasa Febrianti, 2019 & Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu	Laporan Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas	Krisis ekonomi telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. (2) Desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada Pemerintah Pusat dan	Menggunakan analisis model regresi linear berganda	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

			Pemerintah Daerah.		
6.	Hermin Arifianti, Payamta, Sutaryo, 2013 & Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)	<i>Monitoring Mechanism , the Local Governmen t's Performan ce, Audit Findings, Follow Up Recommen dations, Oversight by Legislature , Public Supervision</i>	<i>State, private, society</i>	Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan ekstern yang dilakukan oleh masyarakat dan hasil pemeriksaan oleh BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai sarana perbaikan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.
7.	Lucia Julisa Prihatin Irwan Taufiq Ritonga, M.Buss, Ph.D, C.A., 2016 &	Transparansi, <i>good governance</i> , pemerintah	Tahap perencanaan APBD terdiri dari 10 indikator, tahap	Objek dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan	Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah

	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan	daerah, pengelolaan keuangan daerah	pelaksanaan APBD terdiri dari 9 indikator dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBD terdiri dari 10 indikator.	keuangan daerah berupa dokumen yang diunggah dalam website resmi pemerintah daerah pada 61 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di Kalimantan	rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah 12,67 pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 9,42 di tahun 2016 dari nilai indeks maksimal sebesar 100%. Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient).
8.	Melina marcori ludani, Gustaf budi tampi, Jericho pombengi, 2020 &	<i>Accountability, Local Financial Management</i>	(1) informan kunci, (key informan), yaitu mereka yang	Jenis penelitian yang digunakan dalam	Pertanggungjawaban diserahkan kepada masyarakat

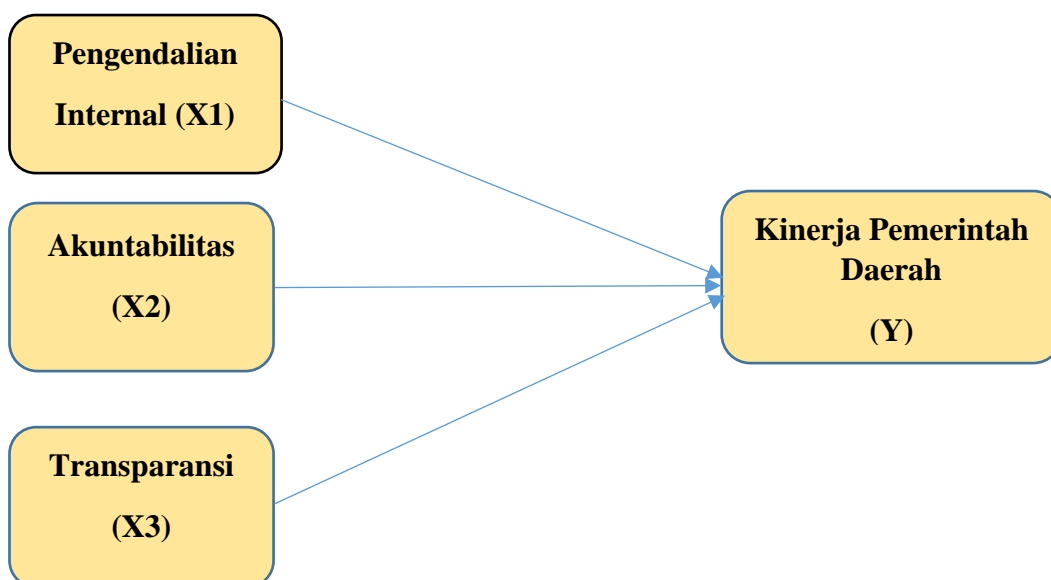
	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)		mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005).	penelitian ini adalah penelitian kualitatif.	agar masyarakat dapat mengetahui dana yang ada dikelola untuk apa dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan program yang ada di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9.	Rosa Nikmatul Fajri, Djumali Djumali, Sri Hartono, 2019 & Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan	Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas, APBD	(1) akurat adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan dan ketepatan; 2) relevan adalah suatu keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang; dan 3) dapat	Menggunakan data primer dan sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner, dan purposive sampling. Analisis data menggunakan SPSS	Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

	Belanja Daerah (APBD)		dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan secara angka nominal dan matematis.		
10.	Toni Nurhadianto, Nur Khamisah, 2019 & Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung	Transparansi, Pengelolaan keuangan daerah, <i>Good governance</i> .	Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.	Obyek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang didesain oleh Huwae (2016) terkait informasi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2016.	Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient) karena memiliki indeks di bawah 20%, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih belum terbuka terhadap informasi di website terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, daerah

					yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki karakteristik opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak.
11.	Fifit Purnama dan Nadirsyah, 2016 & Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten aceh barat daya	<i>Supervision , Accountability ,Transparency ,Local Government Performance</i>	Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts).	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu studi yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat	Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
12.	Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa, 2018 & Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi	Akuntabilitas dan kinerja instansi	(1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.	Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan satuan pengukuran	Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada

	Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh		Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.	satuan skala likert. Peralatan analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linier berganda	Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh
--	--	--	--	---	--

2.3.2 Kerangka Pemikiran



2.3.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pengawasan memiliki pengaruh yang penting. Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal. Menurut Hery (2016:159) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2.3.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Asas Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas yang baik akan meningkatkan tingkat kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Menurut Widodo (2011:136): “Akuntabilitas publik diperlukan karena aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya”. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012) menyatakan bahwa: “Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah”. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fyनेface N. Akani (2017) menyatakan bahwa: “*Transparency and integrity in financial accountability of local governments have a significant relationship with local government performance.*” “Transparansi dan integritas dalam akuntabilitas keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pemerintah daerah.” Akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.3.2.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi (Krina, 2013:134). Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja

organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006).

2.3.2.4 Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam penelitian sebelumnya menurut Menzeis dalam Rahayu (2008) dan Garini (2011) menyatakan bahwa: “Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil teemuanya menunjukkan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Akuntabilitas dan transparansi dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)”.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKAD kabupaten Bogor.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKAD kabupaten Bogor.

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKAD kabupaten Bogor.

Hipotesis 4: Terdapat pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKAD kabupaten Bogor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2012:144) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Jumlah pegawai BPKAD kabupaten Bogor berdasarkan golongan :

Tabel 3. 1 Jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Bogor

No	Golongan/Jabatan	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	1,11
2.	Eselon III	5	5,56
3.	Eselon IV	15	16,67
4.	Fungsional	-	-
5.	Fungsional Umum	69	76,67
		90	100,00

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30). Berdasarkan pengertian unit analisis di atas dapat disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian ialah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai BPKAD kabupaten Bogor.

3.2.3 Lokasi Penelitian

BPKAD kabupaten Bogor Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah benda, hal, atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data (Suharsimi Arikunto, 2005: 88). Sumber data penelitian merupakan faktor penting sebagai pertimbangan penulis dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Jenis data berdasarkan sumbernya :

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Data primer didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti : media massa, perusahaan penyedia data, data yang digunakan peneliti dalam penelitian sebelumnya, data yang disediakan pada statistik software, dan sebagainya.

Jenis data berdasarkan sifatnya yaitu Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti. Jenis data berdasarkan waktu atau periode pengumpulannya yaitu Data *Cross Section* adalah data yang dikumpulkan masih dalam tahun yang sama. Artinya, data tidak mengandung unsur waktu namun data dikelompokkan berdasarkan asal responden.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pengendalian Internal (X1)	1. Lingkungan Pengendalian	1. Penerapan Integritas karyawan pada instansi pemerintah terkait.	1. Ordinal
	2. Penaksiran Resiko	2. Penerapan asesmen risiko yang diwaspadai dan dikelola untuk menetapkan tujuan organisasi guna mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan pada kantor.	2. Ordinal
	3. Aktivitas Pengendalian	3. Penetapan prosedur berdasar hasil asesmen risiko untuk meyakinkan bahwa terdapat tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi risiko yang terkait proses kegiatan pada instansi pemerintah terkait.	3. Ordinal
	4. Informasi dan Komunikasi	4. Sistem informasi dalam pengendalian internal memberikan dasar yang cukup untuk mengevaluasi proses operasi.	4. Ordinal

	5. Pemantauan	5. Keseluruhan proses kegiatan dilakukan monitoring sesuai dengan perubahan kondisi yang dinamis.	5. Ordinal
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	<p>1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran</p> <p>2. Akuntabilitas Manajerial</p> <p>3. Akuntabilitas Program</p> <p>4. Akuntabilitas Kebijakan</p>	<p>1. Penerapan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku atas pembelanjaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang ditetapkan.</p> <p>2. Setiap level pimpinan bertanggung jawab atas penyusunan laporan kinerja.</p> <p>3. Pimpinan menengah (top manajer) bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sesuai dengan misi organisasi.</p> <p>4. Pimpinan kegiatan (manajer operasi) bertanggung jawab dalam pencapaian program sesuai</p>	<p>1.Ordinal</p> <p>2.Ordinal</p> <p>3.Ordinal</p> <p>4.Ordinal</p>

	5. Akuntabilitas Finansial	dengan tujuan organisasi. 5. Setiap level pimpinan bertanggung jawab dalam kinerja finansial organisasi yang ekonomis.	5.Ordinal
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	1. Informatif	1. Informasi kinerja organisasi cukup akurat bagi masyarakat.	1. Ordinal
	2. Keterbukaan	2. Setiap informasi yang diberikan untuk masyarakat memiliki sifat keterbukaan.	2. Ordinal
	3. Pengungkapan	3. Pengungkapan yang lengkap mengenai kondisi keuangan dan hasil kegiatan organisasi.	3. Ordinal

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	1. Input	1. Data mengenai kinerja (berisi jumlah dana, jumlah pegawai, dan jumlah infrastruktur) selalu tersedia di web resmi instansi pemerintah terkait.	1.Ordinal
	2. Proses	2. Proses penerbitan laporan keuangan sesuai pada peraturan perundangan.	2.Ordinal
	3. Output	3. Ketepatan dalam penerbitan laporan keuangan.	3.Ordinal
	4. Outcome	4. Pencapaian kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh karyawan atau pegawai.	4.Ordinal
	5. Benefit	5. Tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah terkait.	5.Ordinal
	6. Impact	6. Tingkat partisipasi dari masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah terkait.	6.Ordinal

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di BPKAD kota Bogor. Sampel penelitian ini diambil menggunakan stratified random sampling yang menurut Sugiyono (2014:64) teknik sampling ini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Teknik ini digunakan untuk pengelompokan sekolah agar jumlah dari sampel menjadi proporsional. Teknik ini digunakan karena objek yang diteliti berstrata, yang terdiri dari beberapa golongan dan jabatan mulai dari kepala badan sampai pelaksana dimana seluruh karyawan atau pegawai yang bekerja sebagai Dinas BPKAD di kabupaten Bogor berjumlah 61 orang.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Ialah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan wawancara serta memberikan atau membagikan kuesioner dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang dapat memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Ialah data yang diperoleh dari laporan-laporan tertulis serta informasi tentang keadaan perusahaan.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147) memberikan pengertian analisis data sebagai berikut: “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.”

Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda karena terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk menganalisis sebuah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berasal dari sebuah populasi atau sampel, diperlukan prasyarat analisis agar data tersebut layak untuk dianalisis. Dengan terpenuhinya prasyarat analisis tersebut, hasil yang diperoleh dari sebuah analisis dapat seperti kenyataan atau mendekati kenyataan sehingga sesuai dengan diharapkan.

a) Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara :

1. Uji Validitas

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji validitas menurut Ghozali (2018) adalah : (1) jika nilai signifikansi dari korelasi suatu item $< 0,05$ maka item tersebut valid. (2) jika nilai signifikansi dari korelasi suatu item $\geq 0,05$ maka item tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Menurut Sekaran & Bougie (2016) Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk *Consistency Reliability* dengan melihat nilai ketentuan *Cronbach's Alpha*. Menurut Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan : (1) jika *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$ maka dinyatakan reliabel. (2) jika *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka dinyatakan tidak reliabel.

b) Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012 : 105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Metode yang digunakan untuk menguji terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau VIF dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- ✓ Jika nilai toleransi < 0,10 atau VIF > 10 maka dikatakan terdapat multikolinearitas
- ✓ Jika nilai toleransi > 0,10 atau VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear.

c) Uji Hipotesis

Untuk mengetahui hipotesis penelitian, maka peneliti menggunakan analisis analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 16.0 for windows. Analisis Regresi Linear Berganda Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel yang digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas.

Dasar pengambilan keputusan. Membandingkan nilai signifikansi (Sig.) :

1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Membandingkan nilai Fhitung hitung dengan Ftabel :

1. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_n X_n$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa khusus bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan Aset menjadi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan dan pada bagian selanjutnya pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2007 dijelaskan bahwa dinas daerah yang harus dibentuk salah satunya yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Oleh karenanya pada tahun 2008 dan sebelumnya fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah melekat pada Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah.

Tahun 2009 yang bertepatan dengan periode penyusunan dan penetapan renstra SKPD tahun 2009-2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah digabungkan dengan fungsi pengelolaan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah menempati gedung yang sebelumnya ditempati oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Jalan Aman No. 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Tahun 2012 fungsi pengelolaan pendapatan daerah dipisahkan dari fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Selama tahun 2012 Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah bersama-sama menempati gedung lama yang berlokasi di Jalan Aman No. 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Mulai Januari 2013 Dinas Pendapatan Daerah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman dan gedung lama sepenuhnya digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Menurut pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh badan adalah Keuangan. Selanjutnya menurut pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor

69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. BPKAD menempati gedung yang sama dengan DPKBD yang beralamat di Jalan Aman No. 1 Cibinong Kabupaten Bogor.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor melalui penyebaran kuesioner kepada 90 pegawai dan didapatkan keseluruhannya sebagai hasil jawaban responden. Berdasarkan penelitian diketahui karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Pria	36	40%
	Wanita	54	60%
Total		90	100%
Usia	20-30 Tahun	34	37,78%
	31 - 40 Tahun	28	31,11%
	41 - 50 Tahun	19	21,11%
	> 50 Tahun	9	10%
Total		90	100%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	23	25,56%
	Diploma	17	18,88%
	S1	36	40%
	S2	14	15,56%
Total		90	100%

Berdasarkan tabel untuk jenis kelamin jumlah presentase responden yang terlibat dalam penelitian ini lebih banyak didominasi oleh wanita dengan jumlah 54 orang atau 60% dan sisanya responden pria dengan jumlah 36 orang atau 40%. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah responden dengan jenis kelamin wanita.

Adapun berdasarkan tingkat usia responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berisua 20-30 tahun sebesar 37,78% dengan total responden 34 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada BPKAD Kabupaten Bogor memiliki usia produktif sehingga produktivitas yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Bogor sedang tinggi-tingginya.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir diketahui sebesar 40% atau sebanyak 36 orang berpendidikan S1. Hal ini menunjukkan bahwa menurut BPKAD Kabupaten Bogor, karyawan dengan minimum pendidikan S1 sudah memiliki ilmu yang cukup untuk bekerja di BPKAD.

Menurut Sugiyono (2017:147) yang dimaksud dengan analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk memperjelas atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah. Statistik deskriptif menjelaskan hasil responden dalam bentuk nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari setiap jawaban masing-masing responden. Responden menjawab dengan memberikan skor antara 1 sampai 5 dengan keterangan :

1 = sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = cukup setuju

4 = setuju

5 = sangat setuju

Nilai minimal yaitu skor terendah yang diberikan responden dan sebaliknya nilai maksimal yaitu skor tertinggi yang diberikan oleh responden, nilai mean menjelaskan hasil rata-rata skor yang diberikan oleh responden, dan standar deviasi menyesuaikan kecenderungan variasi data, jika standar mendekati nol maka variasi jawaban yang diberikan responden semakin heterogen.

Tabel dibawah ini menjelaskan karakteristik untuk variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian.

Tabel Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PI1	90	1	5	3.94	.952
PI2	90	2	5	3.94	.839
PI3	90	2	5	3.93	.897
PI4	90	2	5	4.08	.851
PI5	90	2	5	4.00	.807
A1	90	2	5	4.18	.787
A2	90	2	5	3.89	.694
A3	90	3	5	4.23	.735
A4	90	3	5	4.21	.757
A5	90	2	5	3.83	.768
T1	90	1	5	3.82	.990
T2	90	2	5	3.97	.771
T3	90	2	5	3.93	.818
K1	90	2	5	3.91	.856
K2	90	2	5	3.94	.839
K3	90	2	5	3.70	.814
K4	90	2	5	3.71	.902
K5	90	2	5	3.86	.881
K6	90	2	5	3.87	.889
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel dari 90 pegawai yang menjadi sampel, didapatkan hasil analisis statistik deskriptif yang dimana setiap variabel dengan indikatornya masing-masing memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada mean artinya data relative tidak bervariasi.

4.2 Analisis Data

Analisis hasil dari interpretasi dilakukan berdasarkan pada hasil pengujian terhadap hipotesis, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji data yang dilakukan menggunakan SPSS 22.

4.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) item pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikan dari korelasi item tersebut kurang dari 0,05. Hasil uji validitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Uji Validitas variabel Pengendalian Internal

Correlations

		PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	skoritem1
PI1	Pearson Correlation	1	.699**	.680**	.671**	.512**	.852**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
PI2	Pearson Correlation	.699**	1	.741**	.651**	.514**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
PI3	Pearson Correlation	.680**	.741**	1	.772**	.605**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
PI4	Pearson Correlation	.671**	.651**	.772**	1	.572**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
PI5	Pearson Correlation	.512**	.514**	.605**	.572**	1	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90
skoritem1	Pearson Correlation	.852**	.853**	.900**	.868**	.749**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas untuk variabel Pengendalian Internal menunjukkan bahwa 5 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikansi $0,00090 < 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Pengendalian Internal dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

Tabel 4.4 Uji Validitas variabel Akuntabilitas

		Correlations					
		A1	A2	A3	A4	A5	skoritem2
A1	Pearson Correlation	1	.489**	.568**	.691**	-.006	.834**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.954	.000
	N	90	90	90	90	90	90
A2	Pearson Correlation	.489**	1	.250*	.259*	.028	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000		.018	.014	.793	.000
	N	90	90	90	90	90	90
A3	Pearson Correlation	.568**	.250*	1	.597**	.030	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.018		.000	.780	.000
	N	90	90	90	90	90	90
A4	Pearson Correlation	.691**	.259*	.597**	1	.042	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.000		.695	.000
	N	90	90	90	90	90	90
A5	Pearson Correlation	-.006	.028	.030	.042	1	.338**
	Sig. (2-tailed)	.954	.793	.780	.695		.001
	N	90	90	90	90	90	90
skoritem2	Pearson Correlation	.834**	.598**	.740**	.789**	.338**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas untuk variabel Akuntabilitas menunjukkan bahwa 5 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikansi $0,00090 < 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Akuntabilitas dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

Tabel 4.5 Uji Validitas variabel Transparansi

		Correlations			
		T1	T2	T3	skoritem3
T1	Pearson Correlation	1	.773**	.221*	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.036	.000
	N	90	90	90	90
T2	Pearson Correlation	.773**	1	.281**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000		.007	.000
	N	90	90	90	90
T3	Pearson Correlation	.221*	.281**	1	.617**
	Sig. (2-tailed)	.036	.007		.000
	N	90	90	90	90
skoritem3	Pearson Correlation	.869**	.868**	.617**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas untuk variabel Transparansi menunjukkan bahwa 3 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikansi $0,00090 < 0,05$

sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Transparansi dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

Tabel 4.6 Uji Validitas variabel Kinerja

		Correlations						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	skoritem4
K1	Pearson Correlation	1	.931**	.671**	.562**	.608**	.589**	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K2	Pearson Correlation	.931**	1	.699**	.542**	.597**	.577**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K3	Pearson Correlation	.671**	.699**	1	.768**	.644**	.581**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K4	Pearson Correlation	.562**	.542**	.768**	1	.766**	.679**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K5	Pearson Correlation	.608**	.597**	.644**	.766**	1	.878**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K6	Pearson Correlation	.589**	.577**	.581**	.679**	.878**	1	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
skoritem4	Pearson Correlation	.849**	.845**	.849**	.847**	.882**	.846**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas untuk variabel Kinerja menunjukkan bahwa 6 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikansi $0,00090 < 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Kinerja dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

4.2.2 Uji Realibilitas

Menurut Sekaran (2016) alat ukur dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha* sebesar lebih besar sama dengan 0,60. Hasil uji realibilitas dari penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.7 Uji Realibilitas variabel Pengendalian Internal

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.933	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PI1	19.94	13.230	.772	.926
PI2	19.94	13.863	.786	.923
PI3	19.95	13.157	.848	.915
PI4	19.80	13.689	.805	.920
PI5	19.88	14.794	.650	.939
skoritem1	19.90	13.529	1.000	.900

Tabel 4.8 Uji Realibilitas variabel Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	20.236	5.530	.718	.701
A2	20.524	6.823	.414	.780
A3	20.180	6.118	.591	.737
A4	20.202	5.835	.656	.719
A5	20.580	7.855	.084	.859
skoritem2	20.344	6.116	1.000	.677

Tabel 4.9 Uji Realibilitas variabel Transparansi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.843	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
T1	11.81	3.670	.713	.796
T2	11.66	4.316	.762	.767
T3	11.70	5.285	.371	.923
skoritem3	11.72	4.135	1.000	.686

Tabel 4.10 Uji Realibilitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.946	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1	22.91	19.833	.790	.940
K2	22.88	19.987	.787	.941
K3	23.12	20.134	.794	.940
K4	23.11	19.526	.784	.941
K5	22.96	19.353	.834	.937
K6	22.95	19.629	.784	.941
skoritem4	22.99	19.539	1.000	.925

Dari tabel hasil pengujian realibilitas diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's alpha* untuk masing-masing variabel lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut reliabel.

4.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dapat dilihat dari nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 4.11 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.50370553
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.028
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang ditampilkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai sig = 0,200 > 0,05. Sehingga nilai *Kolmogorov-Smirnov* tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

4.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel dependen (Ghozali 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model dapat dilakukan melihat nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF < 10, maka model regresi tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.132	3.932		2.068	.042		
	Pengendalian Internal	.619	.118	.506	5.237	.000	.909	1.100
	Akuntabilitas	.070	.162	.041	.429	.669	.915	1.093
	Transparansi	.060	.074	.075	.806	.422	.984	1.016

a. Dependent Variable: Kinerja

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.2.5 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali 2018) uji heteroskedastisitas bertujuan tinggi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendapatkan nilai yang baik seharusnya $\text{sig} > 0,05$ agar tidak ada terjadinya heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.940	1.774		1.094	.277
	Pengendalian Internal	.049	.053	.105	.937	.351
	Akuntabilitas	-.018	.079	-.025	-.224	.823
	Transparansi	-.038	.059	-.069	-.638	.525

a. Dependent Variable: RES2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena nilai sig dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05.

4.2.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi berdanda yaitu memiliki lebih dari satu variabel independen. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji individu (t-Test) dan uji serentak (F-Test).

4.2.6.1 Uji Hipotesis dengan Uji t

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model regresi linear berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pengendalian internal, akuntabilitas, dan tranparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Nilai yang dilihat dari uji t ini yaitu pada kolom sig dan t. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t yaitu jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Berikut hasil Uji t pada penelitian ini :

Tabel 4.14 Uji t tabel

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.132	3.932		2.068	.042
Pengendalian Internal (X1)	.619	.118	.506	5.237	.000
Akuntabilitas (X2)	.070	.162	.041	.429	.669
Transparansi (X3)	.060	.074	.075	.806	.422

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Rumus Uji t

Menggunakan tingkat kepercayaan 95%, $\alpha = 0,05$ (Standar statistik)

$$T \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$\alpha = 0,05$$

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel x

$$t \text{ tabel} = t (0,025 ; 86)$$

$$= 1,98$$

- Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,237 > t \text{ tabel } 1,98$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
- Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,669 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,429 < 1,98$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
- Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,422 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,806 < 1,98$. Sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

4.2.6.2 Uji Hipotesis dengan Uji F

Uji statistik F adalah untuk menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan terhadap uji F yaitu jika nilai sig $< 0,05$ atau F hitung $> F \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Berikut hasil Uji F pada penelitian ini :

Tabel 4.15 Uji F tabel

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	403.291	3	134.430	10.533	.000 ^b
	Residual	1097.609	86	12.763		
	Total	1500.900	89			

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

b. Predictors: (Constant), Transparansi (X3), Akuntabilitas (X2), Pengendalian Internal (X1)

Rumus Uji F

F tabel = F (k ; n-k)

= F (3 ; 90-3)

= F (3 ; 87)

= 2,71

- Pengujian Hipotesis Ke empat (H4)

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $10,533 > F$ tabel 2,71. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y

Persamaan Regresi Berganda

$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_n X_n$

$Y = 8,132 + 0,619 X_1 + 0,70 X_2 + 0,60 X_3$

Artinya :

- Koefisien X1 sebesar + 0,619 artinya setiap 1 unit nilai X1 akan menambah nilai Y sebesar 0,69
- Koefisien X2 sebesar + 0,70 artinya setiap 1 unit nilai X2 akan menambah nilai Y sebesar 0,70
- Koefisien X3 sebesar + 0,60 artinya setiap 1 unit nilai X3 akan menambah nilai Y sebesar 0,60
- Konstanta sebesar 8,132 artinya X1, X2, dan X3 = 0 maka Y = 8,132

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian variabel independen yang terdiri dari 3 variabel yaitu pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi dan variabel dependen yang terdiri 1 variabel yaitu kinerja pemerintah daerah memiliki hasil pengaruh yang berbeda berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan bahwa H1 diterima sehingga adanya pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah, hasil uji hipotesis pada H2 ditolak sehingga tidak adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah, begitu juga dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan pada H3 ditolak sehingga tidak adanya pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan uji secara simultan dinyatakan bahwa H4 diterima karena terdapat pengaruh secara simultan pada variabel pengendalian internal, akuntabilitas dan tranparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis H1 diterima dimana menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah melakukan pengendalian internal maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat dan membaik, sehingga dalam melakukan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian internal itu sendiri untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan.

Selain itu pengendalian intern yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa adanya kebijakan dan prosedur yang menggambarkan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penerapan kebijakan SDM, pengawasan intern yang efektif dan hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Bogor telah melakukan Pengendalian Internal yang memiliki pengaruh dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno, dan Novi Puspitasari 2016).

4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada hasil hipotesis maka H2 ditolak, sehingga dapat dikatakan variabel akuntabilitas tidak mempengaruhi secara positif variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian penelitian ini menunjukkan apabila pemerintah daerah belum menerapkan akuntabilitas secara periodik. Kinerja pemerintah dikatakan baik juga apabila setiap perencanaan pemerintah untuk mencapai hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut salah satunya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi dalam penelitian ini sebaliknya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan

awal tidak sama dengan pencapaian hasil akhir karena ada saja yang gagal dimana terkait dengan indikator yang ada dalam variabel meliputi adanya pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, pencapaian tujuan alternatif program, dan pertanggungjawaban lembaga publik belum terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan adanya kegagalan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Bogor belum melakukan Akuntabilitas sehingga tidak ada pengaruh dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey 2018).

4.3.3 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada hasil hipotesis maka H3 ditolak, sehingga dapat dikatakan variabel transparansi tidak mempengaruhi secara positif variabel kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa hak publik untuk mendapat pengumuman oleh pemerintah terkait kebijakan publik belum diikuti oleh efektifitas media yang digunakan. Pemberian informasi kepada publik yang dirasa belum dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran dan belum menjadikan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan diketahui oleh publik karena kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu terdapat indikator yang ada pada transparansi yaitu bahwa pemerintah harus informatif dalam arti informasi yang diberikan itu harus jelas, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dibandingkan, informasi yang ada juga harus terbuka untuk masyarakat dengan pengungkapan yang jelas seperti kondisi keuangan, susunan pengurus serta bentuk perencanaan dan hasil kegiatan sehingga menggambarkan BPKAD belum melakukan hal-hal yang terkait dengan indikator tersebut.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Bogor belum melakukan Transparansi sehingga tidak ada pengaruh dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Astusi 2013).

4.3.4 Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis H4 diterima dimana menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi jika dilakukan secara bersama-sama maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana tujuannya sistem pengendalian intern keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi begitu juga melakukan transparansi dimana suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai serta tanggungjawab lembaga publik harus berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku didalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi sehingga apabila dilakukan secara keseluruhan akan menghasilkan suatu kinerja yang dibutuhkan di pemerintah.

Kinerja juga bukan hanya sebagai pengukur baik atau buruknya suatu instansi tetapi kinerja menghasilkan dampak bagi masyarakat karena di dalam kinerja terdapat *input* yaitu berupa data-data, proses berupa ketaatan pada perundangan, *output* terdapat produk apa yang dihasilkan oleh pemerintah, *outcome* mengenai kualitas dan produktivitas para pegawai, *benefit* berupa tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat serta *impact* merupakan hasil dari kinerja keseluruhan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Bogor sudah melakukan secara simultan Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi sehingga ada pengaruh dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rusdi Abdul Karim dan Mursalim Mursalim 2019)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Bogor dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif pada Pengendalian Internal dengan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Tidak terdapat pengaruh positif pada Akuntabilitas dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Tidak terdapat pengaruh positif pada Transparansi dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Terdapat pengaruh positif pada Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi dengan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan jika pemerintah daerah melakukan hal tersebut secara bersama-sama maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya guna untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dalam penelitian yaitu lebih dari 90 responden sesuai dengan pegawai pada tahun penelitian.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah variabel penelitian yang dapat memberikan pengaruh yang kuat mengenai Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya menyebarkan kuesioner dengan menambahkan indikator variabel agar hasil penelitian menjadi berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. d. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi ke tiga*. Jakarta : Erlangga.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- COSO. (2013). *internal Control-Integrated Framework : Executive summary*. Durham North.
- Dalam, P. M. (2016). *Nomo 108 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah*.
- Dwiyanto, A. D. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada .
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi ke Empat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- H.S, S. d. (n.d.). Rancang Bangun Wahana Pesawat Tanpa Awak (Fixed Wing) Berbasis Ardupilot. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, no.1 Vol.7 page 73-84.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Hopwood, G. a. (1984). *Issues in Public Sector Accounting*. Oxford: Philip Allan.
- L.P.L, U. K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Magdalena, T. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan .* Medan: Universita Negeri Medan.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi ke tiga. .* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi. Edisi ke tiga. Cetakan ke lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun*. (2007).
- Polidano, C. (2008). Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies. *Public Policy and Administration 13 No. 1*, 48.
- Prawirosentono, S. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Renyowijoyo, M. (2105). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saleh, S. H. (2008). *Konsep dan Arti Akuntabilitas*.
- Sekaran, U. d. (2016). *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley and Son Ltd.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah .* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, L. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangasiantar*. Medan: UNM.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Tuanakotta dan M, T. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulum, I. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi. Edisi ke tiga*.

- Umar, Z. e. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Volume 6(2).
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju .
- Widodo, P. (2011). *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek*. Yogyakarta: UML, Graha Ilmu.
- Wiratama, C. (2016, March 06). *Propeller Pesawat Aeromodelling*. Retrieved from <https://www.aeroengineering.co.id/2016/03/propeller-pesawat-aeromodelling/>
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggy Vanesya Putri Syahdika
Alamat : Bella Casa Residence Blok Dahlia6/21A Depok,
16436
Tempat dan tanggal lahir : Jakara, 27 Juli 1999
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SD Yaspem Tugu Ibu 1 Depok
• SMP : SMP Yaspem Tugu Ibu 1 Depok
• SMA : SMA Negeri 8 Depok
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 14 Mei 2021

Peneliti,

Anggy Vanesya Putri Syahdika

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Bogor, 16 Februari 2021

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Sadara/I Responden

BPKAD

Kabupaten Bogor

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan Bogor

Nama : Anggy Vanesya Putri Syahdika

NPM : 022117167

Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat mencapai gelar sarjana Program S1 dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Kabupaten Bogor)”. Untuk itu saya melakukan survey dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut pada BPKAD Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu dan berkenan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan informasi yang sangat berarti, oleh karena itu kelengkapan dan obyektivitas dalam pengisian kuesioner sangat saya harapkan. Selanjutnya, kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i isi akan bersifat ilmiah dan rahasia serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediaannya dalam membantu pengisian kuesioner ini.

Hormat Saya

Anggy Vanesya Putri Syahdika

1. DATA RESPONDEN

Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara memberikan tanda checklist (✓) pada kotak yang sudah disediakan.

Jenis kelamin : Pria Wanita

Umur : < 20 Th 20-30 Th 31-40 Th
 41-50 Th > 50 Th

Pendidikan : SMA/SMK Diploma
 S1 S2/S3 Lainnya...

II. KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner ini berisi tentang pernyataan terkait dengan penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Kabupaten Bogor)”

Petunjuk pengisian:

Berilah tanda checklist (✓) pada kotak jawaban yang sudah disediakan sesuai pilihan jawaban anda.

Keterangan Jawaban:

Skala angka dari 1 – 5, dimana angka **1 = sangat tidak setuju**, **2 = tidak setuju**, **3 = cukup setuju**, **4 = setuju**, dan **5 = sangat setuju**.

A. PENGENDALIAN INTERNAL

Skala jawaban dari 1 - 5 (sangat tidak setuju – sangat setuju).

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Penerapan Integritas karyawan pada kantor BPKAD kabupaten Bogor					
2.	Penerapan asesmen risiko					

	yang diwaspadai dan dikelola untuk menetapkan tujuan organisasi guna mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan pada kantor					
3.	Penetapan prosedur berdasar hasil asesmen risiko untuk meyakinkan bahwa terdapat tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi risiko yang terkait proses kegiatan pada kantor BPKAD kabupaten Bogor					
4.	Sistem informasi dalam pengendalian internal memberikan dasar yang cukup untuk mengevaluasi proses operasi					
5.	Keseluruhan proses kegiatan dilakukan monitoring sesuai dengan perubahan kondisi yang dinamis					

B. AKUNTABILITAS

Skala jawaban dari 1 - 5 (sangat tidak setuju – sangat setuju).

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Penerapan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku atas pembelanjaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang ditetapkan					
2.	Setiap level pimpinan bertanggung jawab atas penyusunan laporan kinerja					
3.	Pimpinan menengah (top manajer) bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sesuai dengan misi organisasi					
4.	Pimpinan kegiatan (manajer operasi) bertanggung jawab dalam pencapaian program sesuai dengan tujuan organisasi					
5.	Setiap level pimpinan bertanggung					

	jawab dalam kinerja finansial organisasi yang ekonomis					
--	--	--	--	--	--	--

C. TRANSPARANSI

Skala jawaban dari 1 - 5 (sangat tidak setuju – sangat setuju).

No	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Informasi kinerja organisasi cukup akurat bagi masyarakat					
2.	Setiap informasi yang diberikan untuk masyarakat memiliki sifat keterbukaan					
3.	Pengungkapan yang lengkap mengenai kondisi keuangan dan hasil kegiatan organisasi					

D. KINERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Item Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Data mengenai kinerja (berisi jumlah dana, jumlah pegawai, dan jumlah infrastuktur) selalu tersedia di web resmi BPKAD kabupaten Bogor					
2.	Proses penerbitan laporan keuangan					

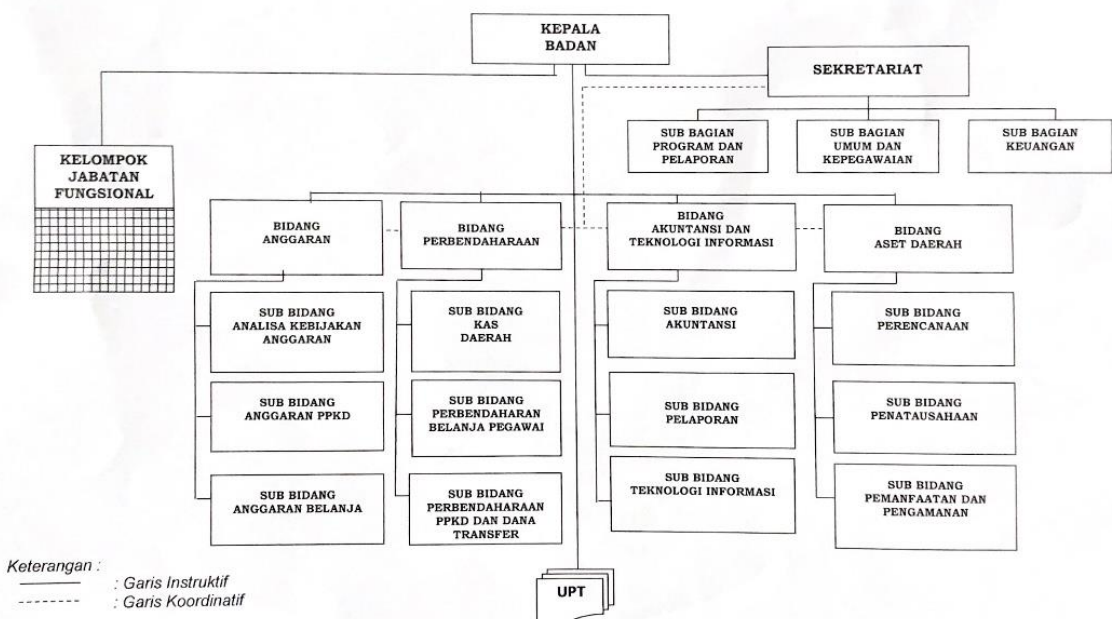
	sesuai pada peraturan perundangan					
3.	Ketepatan dalam penerbitan laporan keuangan					
4.	Pencapaian kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh karyawan atau pegawai					
5.	Tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja BPKAD kabupaten Bogor					
6.	Tingkat partisipasi dari masyarakat terhadap kinerja BPKAD kabupaten Bogor					

Lampiran 2

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN BOGOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 96 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Lampiran 3

TABULASI KUESIONER

No	P11	P12	P13	P14	P15	Pengendalian Internal	A1	A2	A3	A4	A5	Akuntabilitas	T1	T2	T3	Transparansi	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Kinerja
1	3	4	3	4	3	3.40	3	3	5	4	4	3.80	4	3	4	3.67	3	4	4	3	4	4	3.67
2	3	3	4	4	5	3.80	4	4	4	4	3	3.80	4	4	4	4.00	4	4	3	3	4	4	3.67
3	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	3	4	3.80	4	4	3	3.67	3	3	4	4	4	2	3.33
4	4	4	3	3	2	3.20	5	4	5	4	4	4.40	2	3	4	3.00	3	3	3	3	2	4	3.00
5	5	5	5	5	4	4.80	5	4	4	5	3	4.20	4	4	4	4.00	5	5	4	4	4	5	4.50
6	5	5	5	5	4	4.80	5	4	5	5	5	4.80	5	4	3	4.00	5	5	5	5	5	3	4.67
7	3	3	4	4	4	3.60	5	5	5	5	4	4.80	3	3	5	3.67	4	4	4	3	3	5	3.83
8	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	4	4.80	5	5	5	5.00	5	4	5	5	5	5	4.83
9	5	5	5	5	5	5.00	5	4	5	5	4	4.60	5	5	4	4.67	5	5	5	4	5	5	4.83
10	5	5	3	3	4	4.00	4	4	5	3	3	3.80	4	4	4	4.00	4	3	3	3	3	3	3.17
11	4	3	3	5	4	3.80	4	4	3	3	3	3.40	4	4	4	4.00	4	4	4	3	3	3	3.50
12	3	4	3	3	4	3.40	4	3	4	4	3	3.60	4	4	4	4.00	4	4	3	3	4	4	3.67
13	3	3	3	4	3	3.20	4	3	4	4	3	3.60	3	4	3	3.33	3	3	3	4	4	4	3.50
14	3	3	3	2	4	3.00	3	3	4	4	4	3.60	3	3	4	3.33	4	4	3	3	3	3	3.33
15	4	4	4	3	4	3.80	4	3	3	3	2	3.00	4	4	4	4.00	3	3	3	3	4	4	3.33
16	4	3	4	4	4	3.80	4	4	3	4	5	4.00	5	4	4	4.33	4	4	4	5	5	5	4.50
17	4	3	4	4	3	3.60	5	4	5	5	4	4.60	3	4	5	4.00	2	2	5	2	3	3	2.50
18	5	4	4	4	4	4.20	4	5	4	3	3	3.80	5	5	3	4.33	5	5	5	3	5	5	5.00
19	3	4	4	4	4	3.80	3	4	4	3	4	3.60	3	3	3	3.00	4	4	4	4	3	3	3.67
20	2	3	2	3	2	2.40	4	3	4	4	4	3.80	2	3	3	2.67	2	3	2	2	2	2	2.17
21	4	4	3	3	4	3.60	4	4	4	4	3	3.80	3	3	4	3.33	4	4	4	3	3	3	3.50
22	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	3	3.80	5	4	4	4.33	4	4	4	5	5	5	4.50
23	4	3	3	3	4	3.40	3	3	3	3	5	3.40	3	4	2	3.00	3	3	4	4	3	3	3.33
24	1	2	2	3	2	2.00	5	4	5	5	5	4.80	1	2	2	1.67	3	3	2	2	3	3	2.67
25	5	5	5	5	4	4.80	5	5	5	5	4	4.80	3	4	5	4.00	4	4	3	3	3	3	3.33
26	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	4	4.80	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00
27	5	4	4	5	5	4.60	3	4	3	3	4	3.40	5	5	4	4.67	5	5	4	4	5	5	4.67
28	3	4	4	3	4	3.60	4	4	4	3	5	4.00	3	4	4	3.67	4	4	3	3	3	3	3.33
29	4	3	3	3	4	3.40	4	4	5	5	4	4.40	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.00
30	3	4	4	4	4	3.80	4	5	3	4	4	4.00	4	4	3	3.67	4	4	4	4	4	4	4.00
31	3	4	5	4	3	3.80	3	4	5	4	5	4.20	4	3	4	3.67	3	3	4	4	4	4	3.67
32	3	4	4	4	5	4.00	5	4	5	5	4	4.60	4	4	4	4.00	4	4	3	3	4	4	3.67
33	4	5	5	5	4	4.60	4	5	4	5	5	4.60	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.17
34	5	5	5	5	4	4.80	5	4	5	5	5	4.80	3	4	4	3.67	4	4	4	3	3	3	3.50
35	5	5	5	5	4	4.80	5	5	5	5	4	4.80	5	4	5	4.67	4	4	4	4	5	5	4.33
36	5	5	5	5	5	5.00	5	5	4	5	4	4.60	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00
37	5	4	5	5	5	4.80	3	4	5	4	4	4.00	5	5	4	4.67	5	5	4	4	5	5	4.67
38	5	3	3	4	4	3.80	4	4	4	4	4	4.00	3	4	4	3.67	5	5	4	4	3	3	4.00
39	4	4	4	4	4	4.00	3	4	3	3	5	3.60	4	4	3	3.67	3	5	5	4	4	4	4.17
40	3	3	3	3	4	3.20	5	4	5	5	4	4.60	4	3	4	3.67	3	3	3	3	4	4	3.33
41	5	5	5	5	4	4.80	5	5	4	5	3	4.40	4	4	5	4.33	4	4	5	5	4	4	4.33
42	5	5	5	5	4	4.80	5	4	5	5	4	4.60	5	5	4	4.67	4	4	4	5	5	5	4.50
43	4	5	5	5	4	4.60	5	3	5	5	4	4.40	3	4	5	4.00	4	4	3	3	3	3	3.33
44	5	5	5	5	5	5.00	5	4	4	5	4	4.40	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00
45	5	5	4	5	5	4.80	3	4	4	4	4	3.80	5	5	4	4.67	5	5	5	5	5	5	5.00
46	3	3	4	4	4	3.60	4	4	5	3	3	3.80	3	4	4	3.67	3	3	3	3	3	3	3.00
47	4	3	4	4	3	3.60	4	4	3	3	4	3.60	3	4	4	3.67	4	4	4	3	4	4	3.83
48	3	4	3	3	4	3.40	4	3	4	4	4	3.80	4	4	3	3.67	4	4	3	3	4	4	3.67
49	4	3	3	4	3	3.40	4	4	4	4	5	4.20	3	3	3	3.00	3	3	3	4	3	3	3.17
50	3	4	3	3	4	3.60	3	4	4	4	4	3.80	3	3	4	3.33	4	4	3	3	3	3	3.33
51	5	4	4	3	4	4.00	4	4	5	3	4	4.00	4	4	5	4.33	3	3	3	4	4	4	3.50
52	4	3	4	5	5	4.20	4	4	4	4	5	4.20	5	5	4	4.67	5	5	4	5	5	5	4.83
53	4	3	4	4	5	4.00	5	4	5	5	4	4.60	3	4	5	4.00	4	4	3	3	3	3	3.33
54	4	4	4	5	5	4.40	4	3	4	4	3	3.60	5	5	4	4.67	5	5	5	5	5	5	5.00
55	4	4	5	5	5	4.60	3	4	3	3	3	3.20	4	4	3	3.67	4	4	4	5	4	4	4.17
56	4	4	3	4	3	3.60	4	3	4	4	4	3.80	2	3	3	2.67	2	2	2	2	3	3	2.33
57	4	4	3	3	3	3.40	5	4	5	5	3	4.40	4	3	5	4.00	4	4	4	3	3	3	3.50
58	4	5	5	5	5	4.80	4	4	3	4	2	3.40	5	5	2	4.00	4	4	4	5	5	5	4.50
59	2	3	3	3	3	2.80	3	3	3	3	5	3.40	3	2	2	2.33	3	3	3	4	4	4	3.50
60	2	2	2	3	3	2.40	5	3	5	5	4	4.40	1	2	4	2.33	3	3	2	2	3	3	2.67
61	5	4	5	5	4	4.60	5	5	4	4	3	4.20	5	4	4	4.33	4	4	4	4	5	5	4.33
62	3	4	3	4	4	3.60	5	4	5	5	5	4.80	3	4	4	3.67	4	4	4	3	3	3	3.50
63	3	4	4	4	4	3.80	5	3	5	5	4	4.40	3	4	5	4.00	4	4	3	3	3	3	3.33
64	5	5	5	5	5	5.00	5	4	4	5	4	4.40	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00
65	5	5	5	5	4	4.80	3	2	3	4	5	3.40	5	5	4	4.67	5	5	4	4	5	5	4.67
66	3	3	3	3	3	3.00	5	4	5	4	4	4.40	3	4	5	4.00	2	2	3	3	3	3	2.67
67	5	5	5	5	4	4.80	5	5	5	5	3	4.60	5	5	5	5.00	4	4	4	4	5	5	4.33
68	5	5	5	5	5	5.00	5	4	5	5	3	4.40	5	5	4	4.67	4	4	4	5	5	5	4.50
69	5	5	5	5	4	4.80	4	3	3	5	4	3.80	4	4	5	4.33	4	4	3	3	4	4	3.67
70	3	4	5	4	5	4.20	3	3	4	4	4	3.60	4	5	4	4.33	5	5	4	5	4	4	4.50
71	3	3	4	4	5	3.80	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4.00	4	4	3	4	4	4	3.67
72	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	3	5	4.00	4	4	3	3.67	3	3	4	5	4	4	3.83
73	3	3	3	3	4	3.20	5	4	5	5	4	4.60	4	3	4	3.67	3	3	3	3	4	4	3.33
74	5	5	5	4	5	4.80	5	5	5	5	3	4.60	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.00
75	5	5	5	5	5	5.00	5	4	5	5	5												

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Anggy Vanesya Putri Syahdika (P)
Nomor Mahasiswa : 022117167
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/ perusahaan yang saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/ observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

Nama : Nur (P)
Jabatan : Eselon II
Nama Perusahaan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
Alamat Perusahaan : Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914
Judul Penelitian : Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Kabupaten Bogor)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 16 Februari 2021

Yang menyatakan



Anggy Vanesya Putri Syahdika